

**SEME (SOCIAL AND ECOLOGICAL MARKET ECONOMY)
TERHADAP KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN**

**SEME (SOCIAL AND ECOLOGICAL MARKET ECONOMY)
FOR SUSTAINABILITY OF FISHERIES RESOURCES AND FISHERMAN WELL-BEING**

Ivonne Raystika Gretha Kaya^{1*}, Sajriawati¹

¹Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Musamus, Merauke

*Penulis korespondensi: irgk89@unmus.ac.id

Diterima 18 Mei 2023 disetujui 12 Juni 2023

ABSTRAK

Sumberdaya perikanan sangat rentan terhadap perubahan. Pengelolaan terpadu baik antar wilayah, antar sektor maupun antar pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga sumberdaya perikanan tetap berkelanjutan. Pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat yang maksimal baik dari sisi lingkungan, ekonomi maupun bagi masyarakat. "*Social and Ecological Market Economy*" (SEME) didasarkan pada penentuan segitiga strategis yakni perpaduan antara modal, tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini sangat diperlukan sebagai patokan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumberdaya, nelayan sebagai pemanfaat serta sisi ekonomi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan nelayan dan mencegah kemiskinan. Beberapa instrument yang dapat diterapkan dengan berpatokan pada konsep SEME adalah: 1) Mendukung peraturan perundang-undangan, 2) Meningkatkan ekonomi pasar lokal, 3) Menciptakan jaringan kerjasama, dan 4) Membentuk kegiatan maupun usaha perikanan berbasis keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci: *social and ecological market economy*, SEME, sumberdaya perikanan, nelayan, keberlanjutan.

ABSTRACT

Fisheries resources are very vulnerable. Integrated management is needed between regions, sectors and stakeholders to sustain fisheries resources. Good management will provide the maximum benefits of the environment, economy and society. "Social and Ecological Market Economy" (SEME) is based on determining a triangle strategic, is the combination of capital, labor and environmental sustainability. This concept is needed as a benchmark in maintaining a balance between resource sustainability, fishermen as beneficiaries and the economic side to ensure the sustainability of fishermen's lives and prevent poverty. Some of the instruments that can be implemented based on the SEME concept are: 1) Supporting laws and regulations, 2) Improving the local market economy, 3) Creating a network of cooperation, and 4) Forming fishing activities and businesses based on environmental sustainability.

Keywords: *social and ecological market economy*, SEME, fisheries resources, fisherman, sustainability.

Cara sitasi: Kaya, I. R. G., Sajriawati. 2023. SEME (*Social and Ecological Market Economy*) Terhadap Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 7(1): 32-39, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.32/>

PENDAHULUAN

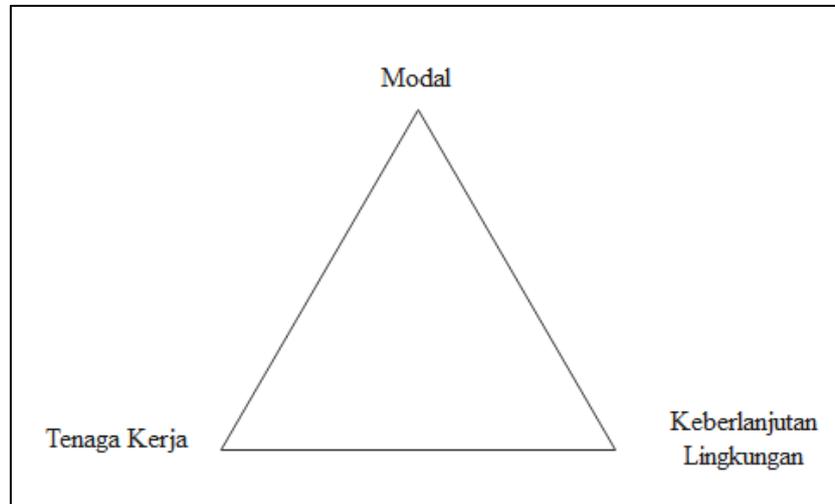
Economy social market muncul dari adanya keprihatinan terhadap kondisi sosial yang dianggap sama pentingnya dengan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi. Kondisi ini dihadapkan pada kekhawatiran mengenai kondisi ekologi lingkungan dimana

economy social market diharapkan dapat menjadi ekonomi yang berorientasi terhadap ekologi lingkungan. Orientasi ekologi lingkungan yang dilakukan tidak boleh melemahkan "merek" ekonomi pasar sosial tradisional. Ekologi yang tercantum dalam *Social and Ecological Market Economy*



(SEME) sama pentingnya dengan elemen pasar dan karakteristik sosialnya. Namun, jika pasar tidak berfungsi dan jika kebijakan ekonomi tidak digabungkan dengan kebijakan sosial preventif dan kompensasi, dimensi ekologi lingkungan tidak dapat secara efektif

dimasukkan ke dalam ekonomi pasar sosial. Jadi, istilah pasar, sosial, dan ekologi lingkungan harus dilakukan secara terpadu satu sama lain sebagai elemen yang sama pentingnya (Benecke, 2008; Hoedl, 2014).



Gambar 1. Segitiga Konsep SEME (Benecke, 2008)

Model "*Social and Ecological Market Economy*" didasarkan pada penentuan segitiga strategis yakni perpaduan antara modal, tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Riegler (2003), instrumen *Social and Ecological Market Economy* yaitu:

- a. Bertanggung jawab terhadap alam
Dampak yang ditimbulkan seperti penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya sebagai dampak dari penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, atau bahkan hingga pencemaran, baiknya dimasukan dalam perhitungan proses produksi maupun dalam penentuan harga produk. Pemerintah juga harus menjamin bahwa pemberian "harga" bagi penggunaan sumberdaya yang terkena dampak berlaku bagi seluruh perusahaan, sehingga terjadi persaingan yang sehat dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumberdaya alam.
- b. Sistem perpajakan
Sistem perpajakan sangat memberikan keuntungan "harga" bagi pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, karena secara tidak langsung

- c. Terbukanya informasi produk yang digunakan
Tuntutan pasar global saat ini, konsumen membutuhkan informasi yang tepat dan mudah dipahami mengenai asal, teknik produksi, bahan, dan teknik perawatan dari sebuah produk. Hal ini berlaku khususnya untuk produk bahan makanan. Selama tidak ada standar kualitas dan penerapan prinsip kehati-hatian secara global, persyaratan mengenai informasi produk merupakan salah satu prasyarat terpenting untuk persaingan yang sehat.
- d. Subsidi untuk mendukung keberlanjutan
Subsidi yang diberikan berasal dari uang pembayar pajak, baiknya dipergunakan untuk kepentingan yang keberlanjutan.
- e. Pendidikan dan informasi tentang isu-isu perlindungan dan kelestarian lingkungan merupakan instrumen penting untuk



meningkatkan kesadaran akan perilaku masyarakat sejak dini.

- f. Menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tanggung jawab internasional Ancaman terhadap tempat tinggal, perubahan iklim, serta masalah lingkungan dan sosial lainnya tidak dibatasi oleh batas negara atau benua. Oleh karena itu, strategi untuk keberlanjutan maupun Tindakan preventif perlindungan lingkungan secara global harus dikembangkan dan ditentukan pada tingkat internasional.

Social and Ecological Market Economy mewakili persaingan stabilitas ekonomi dan fiskal, serta keseimbangan dan pembagian sosial. Kondisi ini bukan tentang menentukan kebijakan ekonomi yang konkret untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kenyataannya, kekuatan *Social and Ecological Market Economy* terletak pada kemampuannya untuk bereaksi secara fleksibel terhadap kondisi di sebuah negara. Negara dan lembaga konstitusionalnya memiliki peran aktif dalam membentuk kehidupan ekonomi dan sosial rakyatnya (Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, 2007).

Sumberdaya perikanan sangat rentan terhadap perubahan, sehingga diperlukan pengelolaan terpadu baik antar wilayah, antar sektor maupun antar pemangku kepentingan. Pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat yang maksimal baik dari sisi lingkungan, ekonomi maupun bagi masyarakat. Konsep SEME diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai keberlanjutan sumberdaya perikanan dan kesejahteraan nelayan.

METODOLOGI

Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan desain pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tentang kondisi yang terjadi, siapa saja yang berperan dan apa yang menjadi permasalahan (Lambert & Lambert, 2012). Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam tulisan ini untuk membahas tentang faktor keberlanjutan sumberdaya perikanan, faktor nelayan, faktor modal serta bagaimana menggunakan konsep *SEME* dalam kaitannya

dengan keberlanjutan sumberdaya perikanan serta kesejahteraan nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan

Keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu upaya tindak lanjut atas penanganan ekosistem yang terancam keberadaannya akibat overfishing, penggunaan alat tangkap yang merusak, bahkan dari konflik yang timbul akibat pemanfaatan lokasi serta sumberdaya (Hughes *et al.*, 2005; Wilkinson dan Souter, 2008). Konsep keberlanjutan dalam menjaga sumberdaya akan berjalan apabila terdapat keseimbangan antara kondisi ekonomi dan lingkungan (Webb *et al.*, 2004; Leleu *et al.*, 2012; Eagles *et al.*, 2013; Bennett, 2016).

Pengelolaan sumber daya perikanan belum memberikan aspek kesejahteraan dan berkelanjutan (Erwina *et al.*, 2015) serta memerlukan keterkaitan dari berbagai aspek baik antar wilayah dan antar sektor maupun antar pelaku serta antar sektor yang sama. Guna menciptakan keterkaitan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan wilayah yang seimbang. Menyadari akan besarnya potensi sumber daya perikanan, berarti mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi wilayah. Berarti secara langsung akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat secara keseluruhan, dan yang penting lagi adalah untuk masyarakat nelayan. Dengan demikian, diharapkan akan tercapainya keadilan (*equity*), pertumbuhan (*growth*) dan berkelanjutan (*sustainability*) (Dahuri *et al.*, 2008).

Salah satu cara dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan adalah dengan menerapkan manajemen pengelolaan perikanan yang efektif untuk meningkatkan perlindungan dan pencegahan terhadap eksploitasi (Silva dan Lopes, 2014) serta menjamin daya dukung kawasan sumberdaya dan perhatian dari pemerintah (Hatcher *et al.*, 2000; Hauck *et al.*, 2006; Basurto *et al.*, 2010).

Nelayan

Nelayan merupakan orang yang mata pencahariannya adalah melakukan penangkapan ikan. Kategori nelayan kecil apabila kegiatan penangkapannya dilakukan



hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Undang-Undang No. 45/2009). Nelayan merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir (Imron, 2003) dan termasuk dalam kelompok kategori miskin (Kusnadi, 2002; Juliantono dan Munandar, 2016).

Mengacu pada sisi ekonomi, kemiskinan sangat mudah dilihat dan dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan (Cinner dan Pollnac, 2004). Kaitannya dengan masyarakat nelayan, kemiskinan dalam dimensi ekonomi secara kualitatif dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan yang seadanya, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah. Hal yang sama pula pada kondisi pendidikan yang juga rendah (Imron, 2003).

Kondisi ini juga dipertegas oleh Humaedi (2012) yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dalam mekanisme produksinya, tetapi juga oleh keadaan eksternal yang tercipta di lingkungannya. Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi internal dalam mekanisme produksi biasanya langsung ditanggapi pemerintah melalui berbagai programnya. Namun tidak demikian dengan penyebab kemiskinan eksternal, yang muncul bersama dalam kehidupan dan praktik kebudayaan masyarakat sangat jarang ditanggapi sebagai faktor penting kemiskinan faktual.

Sebagai contoh pada para pembudidaya rumput laut. Mereka merintis usaha budidaya dengan pengalaman antara 1-6 tahun, dengan mengadopsi teknik budidaya dari orang lain. Rata-rata tingkat pendidikannya mulai dari tamatan SD hingga SMA. Minimnya pengetahuan serta keterampilan dalam mengolah atau diversifikasi produk mengakibatkan pembudidaya selalu menjual rumput laut dalam bentuk kering. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pedagang pengumpul untuk menurunkan harga beli dengan alasan biaya-biaya pengangkutan yang jauh.

Permasalahan minimnya keterampilan, fluktuasi harga hingga panjangnya rantai pemasaran mengakibatkan pembudidaya sebagai produsen selalu mendapatkan

keuntungan yang sangat kecil. Hal inilah yang berdampak pada ekonomi pembudidaya dan pada akhirnya menjadi pemicu kemiskinan dalam kelompok nelayan.

Peningkatan pemberdayaan pembudidaya dilakukan baik dari pihak kementerian maupun dinas terkait (Kirlin *et al.*, 2013; Gauger *et al.*, 2018) untuk mensejahterakan pembudidaya. Beberapa diantaranya melalui program penyuluhan serta sosialisasi tentang prospek pengembangan usaha budidaya rumput laut.

Modal

Modal merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam usaha nelayan (Putra dan Kartika, 2019) untuk meningkatkan pendapatan serta produktifitas usaha. Perolehan modal bisa saja menggunakan modal sendiri ataupun pinjaman (Meisthya, 2014). Modal dalam konsep ini adalah semua bentuk biaya pengeluaran yang dilakukan untuk hasil produksi (Sukirno, 2009), yakni biaya variabel (*variable cost*) dan biaya tetap (*fix cost*).

Biaya variabel merupakan biaya yang secara proporsional dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada jumlah aktivitas yang dilakukan (Horngreen *et al.*, 2006) sedangkan biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan hanya satu kali dalam sebuah usaha (Putra dan Kartika, 2019).

Secara parsial, modal dalam sebuah usaha sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan. Semakin besar modal yang dimiliki oleh seorang nelayan, maka semakin besar pula pendapatan yang akan dimiliki (Yanutya, 2013).

Usaha penangkapan ikan bagi nelayan ibaratnya seni berburu yang hasilnya sulit diperkirakan, tidak pernah pasti, fluktuatif dan sangat spekulatif (Acheson, 1981; Masyhuri dkk., 1999; Masyhuri dan M. Nadjib, 2000; M. Nadjib, 2013). Pada suatu saat nelayan dapat memperoleh tangkapan dalam jumlah banyak, tetapi di saat yang lain mereka tidak mampu memperoleh tangkapan sama sekali. Dengan demikian, pola pendapatan nelayan sangat tidak teratur. Pola pendapatan nelayan yang tidak teratur tersebut telah menciptakan perilaku ekonomi yang spesifik dan spekulatif serta selanjutnya berpengaruh pada pranata ekonomi



dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan. Pranata ekonomi yang berkembang dalam menanggulangi berbagai risiko ketidakpastian dan ketidakteraturan, adalah pranata yang memungkinkan terwujudnya jaminan social ekonomi dalam kehidupan nelayan. Berbagai pranata berbagai risiko yang lazim berkembang pada komunitas nelayan diantaranya adalah institusi bagi hasil tangkapan, berbagi modal (*capital sharing*), *patronage* dan sebagainya. Kelembagaan ini telah mampu membagi risiko ketidakpastian dan ketidakteraturan secara lebih adil dalam sistem ekonomi penangkapan ikan.

SEME dalam Kaitannya dengan Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan serta Kesejahteraan Nelayan

Konsep SEME sangat diperlukan sebagai patokan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumberdaya, nelayan sebagai pemanfaat serta sisi ekonomi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan nelayan dan mencegah kemiskinan. Beberapa hal yang penting untuk diterapkan menggunakan konsep SEME untuk keberlanjutan sumberdaya perikanan serta kesejahteraan nelayan adalah:

1. Mendukung peraturan perundang-undangan.

Pembangunan ekonomi memerlukan penciptaan kerangka hukum, yang meliputi standar hukum yang mengikat dan tindakan negara yang berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum. Kegiatan ekonomi yang berkelanjutan mensyaratkan komitmen terhadap hukum dan ketertiban. Sistem peradilan yang berfungsi memberi semua pemain sektor swasta kerangka kerja yang adil untuk terlibat dalam proses ekonomi. Hak asasi manusia, kesempatan yang sama dan partisipasi merupakan komponen integral dari ekonomi pasar sosial dan ekologis.

Manajemen yang efektif harus dilakukan dengan cara yang seimbang, sehingga kegiatan dapat dilakukan berkelanjutan. Tanpa manajemen yang efektif, akan terjadi misalokasi sumber daya, stagnasi industri, kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Berbagai

contoh di tempat lain, banyak kemajuan dalam mengatasi masalah dengan pendekatan manajemen dibuat oleh bidang kepentingan publik yang besar.

Kebijakan seringkali mengejar beberapa tujuan yang pada akhirnya berada dalam konflik dan persaingan di antara para pemangku kepentingan. Misalnya untuk menciptakan atau mempertahankan lapangan kerja dan menghasilkan peningkatan pendapatan bagi pemerintah, belum lagi juga untuk mempertahankan saham. Kebijakan yang dirancang untuk mengurangi permasalahan di sektor perikanan terkadang tidak memberikan hasil yang baik menuju pembangunan pengelolaan yang berkelanjutan.

Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun adalah dengan memberlakukan sistem kearifan lokal yang bertujuan untuk menjaga sumber daya alam agar tetap lestari untuk saat ini, maupun untuk generasi yang akan datang. Kearifan lokal memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat, karena lahir dari aktivitas pola perilaku manusia dalam masyarakat. Kearifan lokal ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk seperti; ide, gagasan, nilai, norma dan aturan dalam ranah kebudayaan

2. Meningkatkan ekonomi pasar lokal.

Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. Besarnya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada dampak positifnya terhadap lapangan kerja dan pendapatan. Menjamin pemerataan pembangunan ekonomi, proses pertumbuhan harus dirancang sedemikian rupa sehingga kaum miskin mendapat manfaat yang lebih besar. Pendekatan kebijakan ditujukan untuk berbasis luas atau *pro-miskin*. Oleh karena itu, pertumbuhan berusaha untuk meningkatkan baik pertumbuhan ekonomi maupun partisipasi kelompok penduduk miskin dalam hasil-hasilnya. Pengurangan kemiskinan tidak dapat dicapai dengan efek “menetes ke bawah” saja; itu dipupuk pertama dan terutama dengan peningkatan



akses ke pekerjaan dan pendapatan, sumber daya, barang dan jasa untuk kelompok penduduk miskin dan kurang beruntung.

3. Menciptakan jaringan kerjasama.

Ekonomi pasar sosial dan ekologi dibangun atas inisiatif sektor swasta. penyediaan barang dan jasa harus diserahkan kepada perusahaan swasta di mana pun mereka dapat memberikan akses yang lebih baik kepada mereka untuk kelompok penduduk miskin dan kurang beruntung. dengan demikian, privatisasi layanan yang secara tradisional disediakan oleh negara bukanlah tujuan itu sendiri. itu harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang koheren yang terkait dengan pemasangan kompetensi peraturan yang bersangkutan. khususnya dalam hal barang publik – seperti pendidikan, air dan kesehatan – negara harus memastikan bahwa orang miskin memiliki akses ke barang-barang ini dan harus, jika perlu, bertanggung jawab untuk menyediakan layanan ini kepada mereka. negara juga terus memikul tanggung jawab politik atas hasil reformasi atau privatisasi struktur penyelenggaraan publik. prinsip subsidiaritas harus diingat dalam semua kerja sama antara negara, asosiasi dan bisnis: pada dasarnya, negara hanya boleh mengambil tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta secara lebih efisien.

Dua aspek penting dari kemitraan sosial adalah modal dan tenaga kerja. oleh karena itu angkatan kerja dan masyarakat sipil juga harus memiliki suara dalam dialog kebijakan ekonomi, bersama dengan asosiasi bisnis. hak kebebasan berbicara dan kebebasan untuk mengatur serikat pekerja sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dan memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial. mencapai keseimbangan kepentingan antara penyedia modal dan pekerja harus diperhitungkan dalam pengelolaan perusahaan sektor swasta. ini dapat dilakukan melalui penentuan bersama secara aktif oleh tenaga kerja dan

dengan mengizinkan perundingan bersama. Di sisi lain, ketika keputusan bisnis diambil semata-mata atas dasar kepentingan jangka pendek investor modal, hal ini tidak sesuai dengan ekonomi pasar sosial dan ekologis. Jerman mempromosikan upaya untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan didorong untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan untuk memastikan bahwa standar ketenagakerjaan inti internasional dipatuhi.

4. Membentuk kegiatan maupun usaha perikanan berbasis keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan ekonomi tidak boleh dibiarkan berlangsung dengan mengorbankan lingkungan; itu harus diarahkan untuk melestarikan basis sumber daya alam. Pemerintah harus menciptakan insentif ekonomi untuk melestarikan lingkungan melalui kebijakan berwawasan ke depan dan memastikan bahwa standar internasional dipatuhi. langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk memastikan kelangsungan ekosistem lokal dan global di masa depan. ini menyiratkan perlindungan dan penggunaan sumber daya alam yang vital secara berkelanjutan melalui metode produksi yang hemat sumber daya. kegiatan ekonomi ekofisien dan penggunaan energi terbarukan lebih dari sekadar keunggulan kompetitif yang semakin penting. mereka adalah prasyarat untuk nilai tambah yang berkelanjutan dan dengan demikian juga untuk ekonomi yang sesuai untuk masa depan.

Pembagian zona dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kecemburuan antara petani/nelayan lainnya. Strategi ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yaitu melakukan penelitian kesesuaian lahan, sebaran lokasi sesuai dengan peruntukannya, dan mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan. berkala untuk menentukan daerah mutu.

Desain zona pembagian dirancang dengan mengacu pada Keputusan Menteri



tentang Penataan Ruang dan peraturan terkait. Desain pembagian wilayah meliputi zona inti, zona konservasi, dan zona pemanfaatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep "*Social and Ecological Market Economy*" (SEME) didasarkan pada beberapa instrumen yakni: 1) Bertanggung jawab terhadap alam, 2) Sistem perpajakan, 3) Terbukanya informasi produk yang digunakan, 4) Subsidi untuk mendukung keberlanjutan, 5) Pendidikan dan informasi terkait isu perlindungan kelestarian lingkungan dan 6) Menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tanggung jawab internasional. SEME diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan manajemen keberlanjutan lingkungan terhadap pencegahan eksploitasi, menjamin daya dukung kawasan sumberdaya, mencegah terjadinya kemiskinan, pemberdayaan nelayan, serta memperkuat kelembagaan dan sebagai fungsi kontrol dari pemerintah.

Saran

Menerapkan SEME untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dapat diawali dalam proses manajemen yang dikenal dengan POACE (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluation*) sehingga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumberdaya serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan terciptanya kesejahteraan bagi setiap pengguna atau pemanfaat sumberdaya perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basurto, X., Coleman E. (2010). Institutional and Ecological Interplay for Successful Self-Governance of Community-Based fisheries. *Ecol Econ* 69: 1094–103.
- Benecke, D.W. (2008). Social and Ecological Market Economy. A General Overview. Ed. By Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, *Eschborn*, p.23 - 52.
- Bennett, N. J., (2016). Use of perceptions to improve conservation and environmental management. *Conserv. Biol.* 1, 1–5.
- Cinner, J. E., Pollanc, R. B. (2004). Poverty, Perceptions and Planning: Why Socioeconomics Matter in The Management of Mexican Reefs. *Journal Ocean & Coastal Management* 47: 479–493.
- Eagles, P. F. J., Romagosa, F., Buteau-Duitschaeffer, W. C., Havitz, M., Glover, T. D., McCutcheon, B., (2013). Good governance in protected areas: an evaluation of stakeholder's perceptions in British Columbia and Ontario Provincial Parks. *J. Sustain. Tour.* 21, 60–79.
- Erwina, Y., Kurnia, R., Yonvitner. (2015). Status Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan di Perairan Bengkulu. *Jurnal Sosek KP*, 10 (1) : 21-34
- Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. (2007). Social and Ecological Market Economy Principles in German Development Policy. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Bonn – Germany.
- Gauger, L.O., Richmond, L., Hackett, S., Chen, C. (2018). It's a trust thing: Assessing fishermen's perceptions of the California North Coast marine protected area network. *Ocean & Coastal Management*, 158: 144-153.
- Hoedl, E. (2014). European Transition into a Socio-ecological Market Economy. *Cadmus*, 2 (3): 84-93.
- Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G. (2008). *Akuntansi Biaya: Penekanan Manajerial*. Buku Kedua, Edisi Kesebelas. (Diterjemahkan oleh: Desi Adhariani). Indeks. Jakarta.
- Hughes, T. P., Bellwood, D. R., Folke C., Steneck, R.S., Wilson J. (2005). New Paradigms for Supporting the Resilience of Marine Ecosystems. *Trends Ecol Evol*, 20(7): 380-386. DOI: 10.1016/j.tree.2005.03.022.
- Hatcher, A. A., Jaffry, S., Thébaud, O., Bennett, E. (2000). Normative and Social Influences Affecting Compliance with Fshery Regulations. *Land Econ* 76: 448–61.



- Hauck M, Kroese M. (2006). Fisheries Compliance in South Africa: A Decade of Challenges and Reform 1994–2004. *Mar Policy* 30: 74–83.
- Humaedi, M.A. 2012. Kemiskinan Nelayan: Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Upaya Revitalisasi Tradisi Pengentasannya di Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, *Jurnal Sosek Kelautan Perikanan*, 7 (2) 193-206.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5 (1): 63-81.
- Juliantono, F. J., Munandar, A. (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12 (2): 1857-1866.
- Kirlin, J., Caldwell, M., Gleason, M., Weber, M., Ugoretz, J., Fox, E., Miller Henson, M., (2013). California's Marine Life Protection Act Initiative: supporting implementation of legislation establishing a statewide network of marine protected areas. *Ocean Coast. Manag.* 74, 3–13.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Yogyakarta, LKiS.
- Lambert, V.A., Clinton, L. (2012). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*. 16 (4): 255-256.
- Leleu, K., Alban, F., Pelletier, D., Charbonnel, E., Letourneur, Y., Boudouresque, C.F., (2012). Fishers' perceptions as indicators of the performance of Marine Protected Areas (MPAs). *Mar. Policy*. 36, 414–422.
- Meisthya, P. I. A., Sudriman, I. W. (2014). Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di Bali Periode 2001. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 3(3): 96-105.
- Putra, P. M. S., Kartika, N. (2019). Analisis Pengaruh Modal, Umur, Jam Kerja, Pengalaman Kerja, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Nelayan di Kedonganan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8 (2) : 272-303.
- Riegler, J. (2003). Eco-Social Market Economy as an European Innovation. *Agric Econ-Czech*, 49(3): 101-105.
- Silva, M. R. O., Lopes, P. F. M. (2015). Each Fsherman is Different: Taking the Environmental Perception of Small-Scale Fshermen Into Account to Manage Marine Protected Areas. *Marine Policy*, 51: 347-355.
- Webb, E. L., Mailiao, R., Siar, S. V., (2004). Using Local User Perceptions to Evaluate Outcomes of Protected Area Management in the Sagay Marine Reserve, Philippines. *Environ. Conserv.* 31,138–148.
- Wilkinson, C., Souter, D. (2008). Status of Caribbean Coral Reefs After Bleaching and Hurricanes in 2005. Global Coral Reef Monitoring Network, and Reef and Rainforest Research Centre, Townsville, 152 p.
- Yanutya, P. A. T. (2013). Analisis Pendapatan Petani Tebu Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4): 286-296.

